

**PENGARUH PENYALURAN DANA DESA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
BATUJALA KECAMATAN BONTORAMBA
KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

OLEH

RISWAN

NIM 105710206814



**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**PENGARUH PENYALURAN DANA DESA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
BATUJALA KECAMATAN BONTORAMBA
KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Di susun dan diajukan oleh :

RISWAN

NIM 105710206814

Kepada :

**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.

(Muh. Faisal M)

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.

Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembaha bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan

kita pasti bisa! Semangat!!

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Penyaluran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto"
Nama Mahasiswa : Riswan
No Stambuk/NIM : 105710206814
Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018.

Makassar, 14 Agustus 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Dr. Andi Jam'an, SE, MM
NIDN: 0902116603

Pembimbing II,

Abdul Muttalib, SE, MM
NIDN: 0901125901

Diketahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM: 903-078

Ketua,
Jurusan IESP

H.J. Naidah, SE., M.Si.
NBM: 710 561



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Riswan, Nim : 105710206814, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomer : M, 2 Dzulhijjah 1439 H/ 14 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi IESP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

2 Dzulhijjah 1439 H
Makassar, _____
14 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM

(Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)

4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE, M.Si. AK. CA

2. Drs. H. Sanusi A.M., SE, M.Si

3. Agusdiwana Suarni, SE, M.Acc

4. HJ. Naidah, SE.,M.Si

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM

NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riswan

Stambuk : 105710206814

Program Studi : IESP

Dengan Judul : "Pengaruh Penyaluran Dana Desa, Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 14 Agustus 2018

Yang membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh :

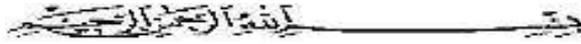
Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078

Ketua,
Jurusan IESP


HJ. Naidah SE., M.Si
NBM: 710 561

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penyaluran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto”**.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta salam yang penuh hormat dengan segenap cinta ananda hanturkan kepada ayahanda Rasidin dan ibunda Suri yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta keikhlasan dalam mendidik penulis dengan segala jerih payahnya. Serta selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya yang terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong SE., M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Dr. Andi Jam'an, MM, selaku Pembimbing I yang senantiasa mencurahkan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Abd Muttalib, SE, MM, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Skripsi hingga ujian Skripsi.
6. Bapak ibu dan asisten dosen Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Saudara-saudariku yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis demi selesainya Skripsi ini.
9. Seluruh keluargaku yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan bantuannya baik moral maupun materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Buat sahabat-sahabat seperjuangan di jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2014 khususnya kelas IESP 3-14 terima kasih atas kebersamaan kita selama ini yang penuh keceriaan.

Akhirnya sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater kampus biru universitas muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2018

Penulis

Riswan

ABSTRAK

Riswan, Nomor Induk Mahasiswa 105710206814 Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Makassar skripsi dengan judul Pengaruh Penyaluran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dibawah bimbingan. Andi Jam'an sebagai pembimbing I dan Abd Muttalib sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto beserta dengan yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumen dan arsif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana Desa yang di lakukan oleh pemerintah Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto mampu meningkatkan pendapatan pertanian masyarakat Desa Batujala. Penyaluran dana Desa yang di salurkan oleh pemerintah Desa Batujala mampu meciptakan pembangunan jalan tani, drainase dan pemberian sarana pertanian sehingga mampu mensejahterahkan masyarakat Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

Kata Kunci : Konsep Desa, Penyaluran Dana Desa, dan konsep Kesejahteraan

ABSTRACT

Riswan, Student Identity Number 105710206814 Economic Studies Study Program, Muhammadiyah University of Makassar thesis titled Influence of Village Fund Distribution to Community Welfare, in Desa Batujala Subdistrict Bontoramba Jenenepono Regency under guidance. Andi Jam'an as the guidance of I and Abd Muttalib as the II.

This study aims to determine the distribution of village funds to the welfare of the community in the village of Batujala District Bontoramba Jeneponto regency and with those who influence it. To achieve these objectives used quantitative research methods by parsing data in a deskriptip. Data collection techniques are descriptive. Technique of collecting data is done by observation, interview and document and arsis by using quantitative descriptive analysis technique.

The results showed that the distribution of village funds affect the welfare of the community. The distribution of village funds which is done by the government of Batujala Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency, is able to increase the agricultural income of Batujala village community. Distribution of village funds in channeled by the government of Batujala village able to meciptatakan construction of farm roads, drainage and create agricultural facilities so as to mensejahterahkan Batujala Village District Bontoramba District Jeneponto.

Keywords: Village Concept, Village Fund Distribution, and Welfare Concept

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| SAMPUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK BAHASA INDONESIA..... | v |
| ABSTRACK | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR BAGANG ATAU GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Tinjauan Teoritis..... | 7 |
| B. Tinjauan Empiris | 27 |
| C. Kerangka Konsep..... | 30 |
| D. Hipotesis..... | 33 |

| | |
|--|---------------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Lokasi Penelitian | 34 |
| B. Tipe Penelitian | 34 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| D. Populasi Dan Sampel | 36 |
| E. Sumber Data | 36 |
| F. Metode Analisis..... | 37 |
| G. Defenisi Operasional Variabel..... | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Gambaran Umum Desa Batujala | 39 |
| 1. Sejarah Desa Batujala..... | 39 |
| 2. Secara georafis dan luas wilayah desa batujala..... | 40 |
| 3. Wilayah pemerintahan desa..... | 43 |
| 4. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa batujala | 44 |
| B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan | 47 |
| 1. Analisis Deskriptif Frekuensi | 47 |
| 2. Analisis Deskriptif regresi linear | 49 |
| C. Hasil Pembahasan | 52 |
| 1. Interpretasi Hasil Penelitian..... | 52 |
| 2. Menjawab Masalah Penelitian | 54 |
| BAB V PENUTUP | 56 |
| A. Kesimpulan | 56 |

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Penelitian Terdahulu | 27 |
| Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto | 42 |
| Tabel 3 Pembagian Wilayah Pemerintah Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaen Jeneponto..... | 43 |
| Tabel 4. Keadaan Tingkat Pendidikan Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto..... | 44 |
| Tabel 5. Keadaan Ekonomi Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto | 45 |
| Tabel 7 Deskriptif Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 47 |
| Tabel 8 Deskriptif Hasil Responden Berdasarkan Usia | 48 |
| Tabel 9 Deskriptif Hasil Responden Berdasarkan Pendidikan | 49 |
| Tabel 10 Tabel Yang Menjelaskan Nilai Kolerasi..... | 50 |
| Tabel 11 Tabel ANOVA | 50 |
| Tabel 12 Tabel Coffecients | 51 |

DAFTAR BAGAN/GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Konsep..... | 32 |
| Gambar 4.1 Stuktur perangkat Desa Batujala..... | 46 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Mengenai Efektifitas Penyalura Dana Desa Terhadap Pembangunan Jalan Tani.
- Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Mengenai Efektifitas Penyalura Dana Desa Terhadap Pembangunan Drainase.
- Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Mengenai Efektifitas Penyalura Dana Desa Terhadap Pemberian Sarana Pertanian.
- Lampiran 4 Pembangunan Jalan Tani Yang Berpengaruh Terhadap Pengangkutan Jagung Kuning.
- Lampiran 5 Pembangunan Drainase Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Padi.
- Lampiran 6 Pengadaan Sarana Pertanian, 2 Hand Traktor.
- Lampiran 7 Mengetahui Hasil Responden Dari Masyarakat Mengenai Efektifitas Penyaluran Dana Desa Terhadap Pembangunan Jalan Tani, Drainase Dan Pemberian Sarana Pertanian.
- Lampiran 8 Mengetahui Hasil Responden Dari Masyarakat Mengenai Pengaruh Pembangunan Jalan Tani, Drainase Dan Pemberian Sarana Pertanian Terhadap Pendapatan Jagung Kuning Dan Padi.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Daerah Indonesia terdiri atas beberapa Daerah Kabupaten/Kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Desa. Desa adalah suatu wilayah yang di tinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan memiliki tata cara sendiri untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani, penduduknya menacari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, pemerintah Desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan Desa di turunkan dari program pembangunan tahunan Desa di turunkan dari program pembangunan jangka menengah Desa.

Penyaluran Dana Desa akan mendorong terlaksananya otonomi Desa sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah Desa dan masyarakat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat Desa agar mampu melaksanakan pembangunan dalam Desanya. Merealisasikan tujuan pembanguan kemudian dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya maka pengetahuan dan keterampilan harus di tingkatkan sehingga mampu mengembangkan dan mampu memanfaatkan potensi Sistem secara maksimal dan pelaksanaan

program pembangunan ekonomi Desa. penyelenggaraan atau keuangan Desa seperti yang di rencanakan oleh pemerintah diterapkan dapat mempercepat faktor pendukung penyelenggaraan otonomi Desa Untuk mengatur rumah tagganya sendiri, Desa memerlukan Dana/biaya yang memadai untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya.

Penyaluran Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan pemerintah Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di salurkan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan penyaluran Dana Desa tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, partisipasi masyarakat dalam Memberdayakan dan MengPengaruhkan bantuan tersebut untuk kedepan.

Tujuan penyaluran Dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintah Desa dalam Menyenggarakan kegiatan pemerintah Desa dan memperdayakan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat, dan bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 pada tahun 2014 pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa, yakni Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*publik good*), pengaturan (*publik regulation*), Dan melaukakan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya di jelaskan, Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintah Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan

pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan dipekenalkan dan dijalankan melalui pemerintah Desa. Pemerintah Desa perlu di kembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu di imbangi dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang menjadi prioritas utama sehingga mampu melakukan pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang sudah terjadi.

Kosekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa ialah tersedianya Dana yang cukup. **Sadu Waistiono** menyatakan bahwa pembiayaan faktor esensial dapat mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah/Desa yang mengatakan bahwa “*di identyc dengan”auto money”* maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Desa membutuhkan Dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan untuk melaksanakan kewenangan yang di milikinya.

Pelaksana pendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Desa di berikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari 7 sumber, yaitu:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Penyaluran APBN (Dana Desa).
3. Bagian dari pajak Daerah dan retribusi Daerah (PDRB) Kabupaten/Kota minimal sebesar 10% dari hasil pajak Daerah retribusi Daerah Kabupaten atau Kota.
4. Penyaluran Dana Desa, yaitu bagian dan pertimbangan yang di terima Kabupaten/Kota di luar DAK (DAU dan BPH) sebesar 10%.
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan.
7. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah Kabupaten atau Kota, dan Desa lainnya.

Saya berharap penyaluran Dana Desa yang di salurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Pembangunan masyarakat Desa ini di arahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, penampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah.

Sehubungan dengan apa yang di uraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Penyaluran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat disusun rumuskan sebagai berikut:

Apakah penyaluran Dana Desa berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Mengetahui proses penyaluran Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangsih peneliti terhadap imput bagi pemerintah Desa.
2. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan kontribusi bagi perkembangan konsep pelaksanaan pemerintahan Desa, khususnya mengenai akuntabilitas sosial dalam pengelolaan dan penyaluran dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Kesejahteraan

Menurut Undang-undang No 11 tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, kedamaian dan masyarakat Desa dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi-fungsi sosialnya di Desa. Permasalahan kesejahteraan masyarakat yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat Desa yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan masyarakat dari Desa. Akibatnya, masih ada masyarakat Desa yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan menurut BKBBN, dirumuskan lebih luas daripada sekedar definisi kemakmuran ataupun kebahagiaan. Konsep sejahtera tidak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan fisik orang ataupun keluarga sebagai entitas, tetapi juga kebutuhan psikologisnya. Ada tiga kelompok kebutuhan yang harus terpenuhi, yaitu: kebutuhan dasar, sosial, dan kebutuhan pengembangan. Apabila hanya satu kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh keluarga, misalnya kebutuhan dasar, maka keluarga tersebut belum dapat disebut sejahtera. Konsep kesejahteraan tidak terlepas dari kualitas hidup masyarakat *widyastuti* (2012). Indikator yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu

Negara adalah pendapatan perkapita **Supartono dkk** (2011). Pembangunan kesejahteraan keluarga mencakup 13 variabel, seperti: terpenuhinya pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, agama, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan, transportasi, tabungan, informasi dan peranan dalam masyarakat. Contoh kecil kesejahteraan masyarakat adalah:

1. Rasa aman
2. Kesejahteraan
3. Kebebasan
4. Jati diri
5. Kemandirian

2. Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta, Desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran masyarakat Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang di akui dalam pemerintahan nasional dan di Daerah Kabupaten.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan Nasional berada di Daerah kabupaten.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal

usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat di mana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa secara umum lebih di kaitkan dengan pertanian. Menurut **Egon E. bergel** (2006:121) adalah setiap pemukiman para petani (peasants). Sebenarnya faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap Desa. Ciri yang utama yang terkait pada setiap Desa ialah fungsinya sebagai tempat tinggal menetap sebagai masyarakat kecil. Sementara itu menurut **Raharjo** (2006:1) bahwa sekitar dari 65 persen dari total penduduk 220 jiwa yaitu sebanyak 143 juta bermukim di Daerah pedesaan, yang mempunyai mata pencaharian utama pada sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan).

Koentjaraningrat (2005:162) memberikan pengertian tentang Desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: Kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, Desa, tetangga dan sebagainya) Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan Desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat.

Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas Desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat Desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat

saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja. Selanjutnya, menurut **Landis H.** (2012:12-13), seorang Sospol pedesaan dari Amerika Serikat mengemukakan definisi tentang Desa dengan cara membuat tiga pemilihan berdasarkan pada tujuan analisis yaitu Untuk tujuan analisis statistik, Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang, Untuk tujuan analisa ekonomi, Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, Desa di definisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya bergantung kepada pertanian. Menurut **Widjaja H.A.W.**(2002:3) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Pemikiran Desa dalam mengenai pemerintahan adalah keanekaragaman partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Di bentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi masyarakat budaya masyarakat setempat Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di Desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan Desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum

pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Dalam undang-undang No 6 (enam) tahun 2014 pembentukan Desa harus memiliki syarat sebagai berikut.

1. Batas usia induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembenkang
2. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
3. Masyarakat budaya yang dapat menciptakan solidaritas atau kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa .
4. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya Ekonomi pendukung.
5. Batas wilayah Desa yang di nyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah diTetapkan dalam peraturan Bupati/waliKota.
6. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan penghasilan ketersedianya Dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu Desa, ada hal lain yang harus di lengkapi juga yaitu unsur-unsur Desa dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur Desa adalah komponen-komponen pembentuk Desa sebagai satuan ketatanegaraan masyarakat. Komponen-komponen tersebut adalah.

1. Wilayah Desa merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan;
2. Penduduk atau masyarakat Desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di Desa selama beberapa waktu secara berturut-turut;
3. Pemerintahan adalah suatu Sistem tentang pemerintah sendiri dalam arti di pilih sendiri oleh penduduk Desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat Desa;
4. Otonomi adalah sebagai pengatur dan pengurus tangga sendiri.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan local berskala Desa;
3. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah propinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang.

Landasan dan unsur-unsur pemerintah Desa adalah salah satu beberapa hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi Daerah yang di terapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah di tentukan bisa di jalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan

lokal yang di miliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

3. Pemerintah kepala Desa

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk di Daerah tingkat 1 (satu), segala urusan yang di lakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan Desa secara transparan akuntabel, partisipatif serta di lakukan dengan tertib dan di siplin, sehingga masyarakat yang ada di Desa mampu mengetahui penyaluran Dana Desa yang telah di berikan Transparan artinya di kelola secara terbuka; akuntabel artinya di pertanggung jawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya di samping itu, keuangan Desa harus dibukukan dalam Sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Pokok-pokok muatan pemerintah tersebut, antara lain:

- a. Prinsip bagi transparan dan akuntabilitas mengenai penyusunan, perubahan, dan perhitungan APBDesa, pengelolaan kas tata cara pelaporan, pengawasan intern, otorisasi, dan sebagainya, dan prosedur pengelolaan;
- b. Pedoman laporan penanggung jawaban yang berkaitan dengan pelayanan yang di capai, biaya satuan komponen kegiatan, dan standar akuntansi pemerintah Desa, serta presentase jumlah penerimaan

APBDesa untuk membiayai administrasi umum dan pemerintahan umum.

Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan Desa dan diwakili oleh pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang di pisahkan. Oleh karena itu, kepala Desa atau pemerintah Desa mempunyai kewenangan. Antara lain:

3. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
4. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa;
5. Menetapkan bendahara Desa;
6. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
dan
7. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan keuangan Desa di bantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa bertindak selaku kordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggung jawab kepada kepala Desa. Pemegang kas Desa adalah bendahara Desa. Kepala Desa menetapkan bendahara Desa dengan keputusan kepala Desa.

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan baran Desa;
3. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan penanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
4. Menyusun rencana sebagai keputusan kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan dan tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

Pemerintah Desa wajib membuat APBDesa, melalui APBDesa kebijakan Desa yang di jabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah di tentukan anggarannya. Dengan demikian,kegiatan pemerintah Desa berupa pemberian layanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah di rancang anggarannya sehingga sudah di pastikan dapat di laksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintahan Desa tidak dapat melaksanakan program kegiatan pelayanan publik.

Pemerintah Desa bagian dari pemerintah Nasional yang di selenggarakan oleh kepala Desa, kemudian di tujukan kepada Desa. Pemeintah Desa adalah suatu proses di mana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan di padukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat Desa. Pemerintah Desa. Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah, (wewenan otonomi/pemerintahan sendiri), juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya. Pemerintahan desa di selenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala Desa beserta pada pembantunya, mewakili masyarakat yang bersangkutan.

Di samping kewenangan dan hak yang di miliki kepala Desa, dalam konteks undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya pada pasal 26 ayat 2 menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
4. Menetapkan peraturan Desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. meningkatkan perekonomian masyarakat Desa mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif dan kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan masyarakat budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan;
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada delegasi kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan

Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu: Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata cara pemerintah Desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
5. Meberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa;

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

7. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perEkonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; dan
15. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.

4. Pengelolaan

Menurut **Thomas** (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Sementara itu menurut **Purwanto** (2009) Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksana yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Uraian tersebut dapatlah di simpulkan bahwa yang di maksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusiayang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Sedangkkn menurut **nugroho** (2013:119) pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dar kata kelolah (to mage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untukmencapai ujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh di artikan sabagai penyelenggaraan dan sebagainya jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang di maksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

5. Penyaluran Dana Desa

Dana Desa disalurkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Penyaluran Dana Desa di lakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) ke rekening kas umum Daerah (RKUD) kemudian, Dana Desa tersebut di salurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa penyaluran Dana Desa kepada Desa di lakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum Daerah (RKUD) ke rekening kas Desa (RKD)

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi Daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi Daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan

langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah Kabupaten. Menurut **Widjaja H.A.W.** (2003:113) Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui Dana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di peDesaan.

Penyaluran Dana Desa merupakan perimbangan Dana Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat Desa. **Wasistiono** (2002:110) mengatakan bahwa Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reformasi di Desa. Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya Desa yang terkuras keluar, perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik.

Sebagai konsekuensi diberikannya otonomi kepada Desa maka diberikan pula anggaran untuk mengelola Daerahnya yang disebut Penyaluran Dana Desa. Penyaluran Dana Desa adalah Dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari

bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Berbicara tentang penyaluran Dana Desa pemerintah Kabupaten/Kota harus mengalokasikan Dana dari APBDesa kepada kepala Desa. Penyaluran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/kota yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang di terima oleh Kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepulu persen). Tujuan penyaluran Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa (BUNDES);
3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan dan kewakiban masyarakat;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian ekonomi pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
5. Meningkatkan kreatifitas, pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
6. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat Desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Penyaluran Dana Desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat Desa. dengan adanya penyaluran

Dana Desa, Desa memiliki kesempatan untuk mensejahterahkan masyarakatnya.

Penyaluran Dana Desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa, Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Penyaluran Dana Desa yang diterima.

Pemberian Penyaluran Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran Dana Desa adalah salah satu pendapatan Desa yang diperoleh melalui dari perimbangan dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan Dana tersebut akan di gunakan oleh pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya.

Adapun pengaruh penyaluran Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat ialah:

1. Mampu meningkatkan penyaluran Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dan mampu mendukung pengembangan pusat-pusat produksi pertanian dan pemasaran komoditas unggulan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat;

2. Mencipakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan Ekonomi yang berbasis masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan rakyat dan Daerah;
3. Mengembangkan sistem perencanaan yang partisipatif untuk mendukung kebijakan pembangunan berorientasi lingkungan hidup berbasis peDesaan dan perkotaan;
4. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan yang religious demokratis dan berkeadilan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram;
5. Meningkatkan kapasitas aparat dan kapasitas kelembagaan pemerintah Daerah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik untuk melaksanakan pelayanan public yang berkualitas.

6. Pengelolaan Dana Desa

Menurut *permendagri* (2014:113) pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Desa

a. Perencanaan

Perencanaan adalah penyusunan pemerintah Desa tentang perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Menurut **Suharto** (2010:71), perencanaan pada hakikatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian,

kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk kesejahteraan anggotanya, sementara itu menurut *manila I. GK.* (2003:25) mengatakan bahwa perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang kan di kerjakan atau di lakukan di masa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya. Berdasarkan penjelasan tentang konsep perencanaan, maka perencanaan dalam penelitian ini dapat di artikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelolaan penyaluran Dana Desa dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa di sebut dengan pergerakan yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana.

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewengan Desa dilaksanakann melalui rekening kas Desa. Jika Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan, langkah selanjutnya pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian Suharto (2010:79) Tahap

pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah.

Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis. Perangkat Desa kedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa di bantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kelola Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

c. Pelaporan

Menurut peraturan Bupati Jeneponto tentang Petunjuk teknis Penyaluran Dana Desa tahun 2016 Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berskala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan penyaluran Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan penyaluran dan Desa mencangkup pelaksanaan dan penyerapan Dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian dari hasil akhir penggunaan Dana Desa. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Penyampaian laporan berdasarkan jalur struktural dari tim pelaksana tingkat Desa dan di ketahui kepala Desa ke tim pendamping tingkat

kecamatan secara bertahap. Tim pendamping kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada bupati tim fasilitasi tingkat Kabupaten tingkat Kabupaten/ kota pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan tim pendamping di bebaskan pada Anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau kota diluar Dana penyaluran Dana Desa.

d. Penanggung jawaban

Menurut peraturan Bupati Jeneponto tentang petunjuk teknis Penyaluran Dana Desa tahun 2016 pertanggung jawaban terdiri dari kepada Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/WaliKota melalui camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana di maksud pada ayat (2) di sampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bentuk laporan tersebut terintegrasi dengan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa (LPPD).

Penyaluran Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa sehingga bentuk tanggungjawabnya adalah pertanggung jawaban APBDesa. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa adalah, sebagai berikut:

1. Laporan berskala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa di buat secara rutin setiap bulan. Adapun yang di muat dalam laporan ini adalah realisasi peneimaan Dana Desa dan realisasi belanja Dana Desa.

2. Laporan akhir penggunaan penyaluran Dana Desa, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan Desa, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian ini sudah dilakukan oleh (Azwardi Sukanto 2006) dengan judul Efektipitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Propinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh (Achmad djumali 2014) dengan judul Pengaruh Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balangsiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Penelitian ini juga sudah dilakukan oleh (M. Agus Salim 2006) dengan judul Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kabupaten Sampang. Penelitan ini sudah dilakukan oleh (Mahfudz 2009) dengan judul Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh (Vicky V. J. Panelewen) degan judul Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

Tabel. 1

Penelitian terdahulu

| | | | |
|------------------------|---|------------------------|---|
| Azwardi Sukanto (2012) | Efektipitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan di Propinsi Sumatera Selatan | Deskriptif kuantitatif | <p>Efektipitas alokasi Dana Desa mengacu pada azaz:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Azaz merata, besarnya bagian alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa. 2. Azas adil, besarnya bagian alokasi Dana Desa berdasarkan nilai bobot Desa. |
| Achmad djumali (2014) | Pengaruh Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balangsiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan | Deskriptif kuantitatif | <p>Faktor faktor yang mendukung Pengaruh Alokasi Dana Desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Nunukan No 11 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten nunukan. Dari kebijakan tersebut dapat di jadikan sebagai dasar pelaksanaan 2. Keputusan-keputusan kepala badan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa kabupaten Nunukan tentang pembentukan tim pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Nunukan, yang menjadi dasar PNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota TIM, termasuk beban anggaran yang di gunakan dalam pembiayaan Tim. <p>Factor-faktor yang menghambat Pengaruh Alokasi Dana Desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya keselarasan/sinkronisasi antara jadwal kegiatan yg dibuat dalam rencana kerja dengan pencairan Dana ADD sehingga semua kegiatan mengalami pergeseran dan pada akhirnya pelaksanaan dalam program menjadi kurang efektif dan kurang efisien 2. Terbatasnya keterlibatan tenaga-tenaga terampil (relawan) dan yang berpengalaman dalam pelaksanaan/ pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Balangsiku, sehingga membawa |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|---|
| | | | konseskuensi terhadap kurang efektifnya dalam pelaksanaan program . |
| M. Agus Salim (2006) | Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa banyuates Kabupaten Sampang | Deskriptif kuantitatif | Tata cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi Desa yng di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. |
| Mahfudz (2009) | Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa | Dekriptif kuantitatif | Sebagian besar responden menyatakan bahwa dengan adanya ADD untuk desa mereka dirasa sangat bermanfaat, dan hanya ada satu responden yang menyatakan sangat tidak bermanfaat. sedangkan untuk ADD yang diperbantukan pada lembaga Desa seluruh responden menyatakan bermanfaat, karena ADD dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. |
| Vicky V. J. PIneleng (2010) | Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa | Deskriptif kuantitatif | Secara umum perencanaan pelaksanaan evaluasi dan penanggung jawaban Dana Desa di Kecamatan pilerreng Kabupaten Minahasa telah berjalan denagan baik. Berdasarkan observasi dan wawancara kepada hokum tua sekretaris Desa dan aparat Desa dan BPD di Daerah penelitian terlihat bahwa pemerintah Desa selalu membuat perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa membuat Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) |

C. Kerangka Konsep

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dilihat dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses Pengelolaan Dana Desa melalui Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 2 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa.

Pelaksanaan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Jeneponto ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi Daerah, Desa semakin membutuhkan penDanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam meningkatkan pembangunan Daerah yang bertujuan untuk mengsejahterahkan masyarakat yang ada di Desa. Pemerintah Kabupaten Jeneponto berharap dengan adanya penyaluran Dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di Desanya dan ikut merealisasikannya. Namun, pengelolaan Penyaluran Dana Desa tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi baik bersifat mendukung maupun yang menghambat prosesnya.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa, dimana Perencanaan adalah pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, kemudian yang di maksud dengan pelaksanaan yaitu pelaksanaan anggaran Desa

yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.

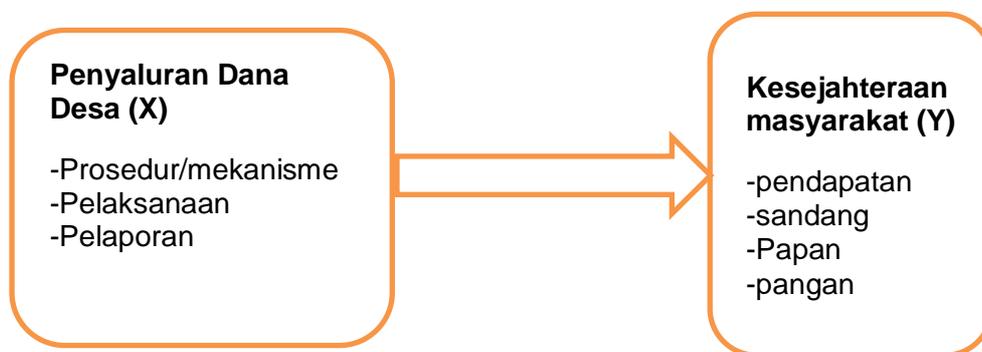
Pelaporan dilakukan dalam bentuk Laporan berskala dan Laporan akhir Penggunaan Dana Desa harus di buat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian Laporan atas realisasi penggunaan Dana yang dibiayai oleh alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan secara berjenjang oleh kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa kemudian selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMDK Kabupaten Jeneponto sebagai dasar untuk melakukan penyaluran Dana.

Proses dalam penyampaian laporan penggunaan penyaluran Dana Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu dan apabila Laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan Dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penilaian Tim yang pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati berikutnya kemudian Menyampaikan Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/walikota, Pertanggung Jawaban terdiri dari kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyaluran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan factor-faktor penghambat yakni sumber daya manusia, petunjuk teknis, pengelolaan penyaluran Dana Desa yang setiap tahun bisa berubah.

Gambaran singkat pengelolaan keuangan Desa dalam hal ini pengelolaan penyaluran Dana Desa di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto beserta berdasarkan faktor yang memepengaruhi kesejahteraan masyarakat sebagai berikut.



Gambar.1

Skema kerangka pikir penelitian

D. Hipotesis Penelitian

Diduga penyaluran Dana Desa berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Jeneponto di mana titik pengembalian data penelitian tentang Implementasi Penyaluran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba. Penelitian ini dilakukan Selama dua bulan mulai dari bulan April sampai dengan bulan Mei.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan adalah yakni kuantitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pengaruh Penyaluran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Menurut **Sugiyono**, (2010) metode kuantitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada ilmu positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu teknik pengambilan data di lakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan populasi dan sampel. Teknik ini akan menggunakan Teknik Wawancara yang didalamnya ada 5 (lima) pertanyaan dan 30 (tiga puluh) responden dari masyarakat agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian. Penelitian ini tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Dokumen dan Arsip

Pada teknik ini akan dilakukan setelah pustaka, dimana peneliti akan mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku. Metode dekumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/poto, atau film audio visual, data statistic, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah.

D. Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Pemilihan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa populasi yang di ambil tersebut memiliki informasi yang di perlukan bagi penelitian yang di lakukan.

Adapun yang menjadi Populasi pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa batujala;
2. Sekretaris Desa batujala;
3. Kepala dusun;
4. tokoh masyarakat; dan
5. masyarakat.

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang di maksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang di butuhkan dan relepan dengan kebutuhan penelitian salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil setelah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau *literature* yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, atau arsip dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

F. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui Pengaruh Penyaluran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto persamaan yang menyatakan bentuk hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) disebut persamaan regresi. Pengelolaan data regresi akan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Y =Kesejahteraan masyarakat

X =Penyaluran Dana Desa

b1 b2 =koefisien-regresi

e =tingkat kesaalahan

Untuk menjawab rumusan masalah, manfaat penelitian dan tujuan penelitian terhadap Pengaruh Penyaluran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba.

G. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi konsep bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka dari itu disusun defenisi konsep yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni:

- a. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan Nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Pemerinth desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Batujala.
- b. Penyaluran dana Desa yaitu pengelolaan yang di artikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan seransgkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu, pengelolaam keuangan Desa yang didalamnya disebutkan tahapan tahapan pemgeloan yaitu:
 1. Perencanaan yang di maksud adalah tahapan penggunaan penyaluran Dana Desa.
 2. Pelaksanaan yang di maksud yaitu tahapan pelaksanaan penyaluran dana Desa yang disalurkan kepada masyarakat.
- c. Kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan dasar baik itu dari segi sandang, papan,pangan dan meningkatnya pendapatan masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu Daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Jeneponto adalah Bontolungga. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 KM² dan berpenduduk sebanyak 330.735 jiwa, kondisi tanah (topografi) pada bagian utara terdiri dari daratan tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 M, bagian tengah 100 sampai dengan 500 M dan pada bagian selatan 0 sampai dengan 150 M di atas permukaan laut. Desa Batujala berada pada ketinggian antara 500M – 900 M di atas permukaan laut, dengan keadaan topografi bergelombang sampai berbukit. Jarak keibukota Kecamatan 14.50 KM dan jarak ke kota Kabupaten 15.18 KM.

1. Sejarah Desa Batujala

Menurut cerita rakyat yang sudah turun temurun bahwa sebenarnya Batujala itu diambil dari suatu cerita rakyat, dimana pada zaman dahulu kala di gunung saukanga atau di Parang Barata tiba-tiba muncul sebuah cahaya kemudian menjelma menjadi seekor ayam bercampur emas, masyarakat kaget atas kejadian itu lalu semuanya berkumpul sambil berdoa tuju hari tuju malam **ABBARATA/BERTAFAKUR** saat itu mata haripun nampak kedinginan anginnya tenang, ayam tidak berkokok akhirnya kampung itu dinamakan **PARANG BARATA** pada hari ketujuh ayam itu terbang menuju salah satu perkampungan lalu masyarakat mengejanya kemudian burung itu dijala yang sekarang nama Kampung Batujala Selain itu disaman kerajaan hanya empat

Toddo yang dapat mengangangkat Raja atau karaeng Binamu yaitu Toddo Lentu, Toddo Bangkala, Toddo Layu dan Toddo Batujala.

Pada tahun 1980 Desa Bulusibatang dibawa pimpinan ABD AZIS BETA Bulusibatang dimekarkan menjadi 3 Desa yaitu Desa Bulusibatan, Desa Persiapan Bulusuka dan Desa Persiapan Batujala dibawa pimpinan ASIS sebagai Pejabat Sementara dan pada tahun 1983-1993, Desa Batujala dipimpin oleh MANNANATARAN DG LABBANG, pada tahun 1993-2003 Desa Batujala dipimpin oleh H.FAKKIHI SIKKI dan pada tahun 2003-2014 Desa Batujala dipimpin oleh HARTONO, SE. Selanjutnya pada tahun 2016 Desa Batujala dipimpin oleh SUKIRMAN sampai masa jabatan 2021.

Desa Batujala merupakan salah satu Desa/kelurahan di Kecamatan Bontoramba, Kabupaten. Jeneponto yang mempunyai luas wilayah $\pm 947,0$ km², yang terdiri dari lahan pertanian, sebagai berikut;

2. Secara Geografis dan Luas Wilayah Desa Batujala

Desa Batujala merupakan salah satu Desa/kelurahan di Kecamatan Bontoramba, Kabupaten. Jeneponto yang mempunyai luas wilayah $\pm 947,0$ km², yang terdiri dari lahan pertanian, sebagai berikut;

Luas Wilayah Desa Batujala adalah 947 Km² yang terdiri dari lahan Pertanian:

1. Persawahan tadah sekitar ± 642 Ha
2. Perkebunan sekitar ± 971 Ha
3. Daerah Pemukiman ± 81 Ha
4. Daerah Hutan sekitar ± 51 Ha
5. Daerah Aliran Sungai (DAS) $\pm 13,500$ M

6. Material batu gunung sekitar \pm Ribuan Ton/Ha

7. Sumber Mata Air sekitar \pm 18 titik

Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Bulusibatang pada tahun 1983, antara lain :

Sebelah utara : Desa Marayoka Kec. Bangkala

Sebelah Selatan : Desa Maero

Sebelah Barat : Desa Bulusuka dan Desa Kapita Kec. Bangkala

Sebelah Timur : Desa Bulosibatang dan Kel. Bontoramba

Dilihat dari letak geografisnya Desa Batujala berada pada daerah dataran pegunungan dengan jarak dari Kabupaten menuju ibu kota Kecamatan 3 km yang dapat di tempuhnya dalam jangka waktu \pm 30 menit dengan menumpangi kendaraan beroda dua (ojek) sedangkan untuk ke ibukota Kabupaten yang berjarak 10 km dapat ditempuh dalam jangka waktu 1 jam dengan menggunakan kendaraan beroda dua tapi itupun harus keluar Kecamatan karena angkutan umum berupa mobil tidak tersedia di Desa.

Desa Batujala terdiri dari 11 dusun yaitu dusun Batujala, Batujala Toa, Borongkeloro, Ta'buakkang, Ballarompo I, Ballarompo II, Saluloe, Saluka, Parang Barata, dan Barata dengan jumlah RK sebanyak 11. Desa Batujala merupakan daerah lahan pertanian yang terdiri dari persawahan tadah hujan \pm 76 Ha, irigasi $\frac{1}{2}$ teknis \pm 35 Ha, ladang/tegal sekitar \pm 543 Ha, pemukiman \pm 13,80 Ha dan sisanya daerah hutan dan fasilitas umum sekitar \pm 303,0 Ha.

4.1. Tabel jumlah penduduk Desa Batujalan 2017

| Jenis Kelamin | Dusun Batujala I | Dusun Batujala II | Dusun Ballarom po I | Dusun Ballarom po II | Dusun Ta'buakang | Dusun Borong Keloro | Dusun Bungung Bangkala | Dusun Saluloe | Dusun Saluka | Dusun Barata | Dusun Parang Barata |
|---------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) |
| Laki-Laki | 216 | 112 | 240 | 349 | 336 | 242 | 180 | 291 | 165 | 218 | 178 |
| Perempuan | 204 | 109 | 221 | 381 | 357 | 248 | 187 | 206 | 155 | 206 | 159 |
| Jumlah Jiwa | 420 | 221 | 461 | 730 | 693 | 490 | 367 | 397 | 320 | 424 | 337 |
| Jumlah KK | 137 | 94 | 129 | 219 | 173 | 145 | 95 | 125 | 130 | 117 | 103 |

Sumber : Profil Desa Batujala

Rumus Tabel Jumlah penduduk Desa Batujala;

❖ L : $b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l = 2.427$ Orang

❖ P: $b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l = 2.433$ Orang

❖ JJ: $b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l = 4.860$ Jiwa

❖ JK: $b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l = 1.468$ Kepala Keluarga (KK)

Pada umumnya iklim Desa ini hampir sama dengan Desa yang ada di luar wilayah Kecamatan Bontoramba dimana curah hujan berkisar 6 bulan yang dimulai dari bulan Oktober sampai April sedangkan 6 bulan berikutnya adalah musim kemarau yang dimulai dari bulan Mei sampai September. Desa ini memiliki sungai namun debit airnya berkurang pada musim kemarau karena hanya mengandalkan air hujan sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk menyiram tanaman sedangkan untuk memenuhi kebutuhan minum masyarakat masih mengandalkan air sumur gali yang semua dusun memiliki hanya saja seperti dengan sungai bahwa pada saat musim kemarau tiba debit air juga berkurang bahkan ada yang kering. Secara umum wilayah Desa Batujala memiliki jenis tanah berwarna abu-abu dengan

tekstur tanah lempungan dalam kedalaman 0,5–1m. Kecocokan daerah tersebut untuk tanaman jangka pendek seperti Jagung, padi, kacang-kacangan, bawang merah, cabe, ubi kayu dll.

3. Wilayah Pemerintahan Desa

Wilayah Pemerintahan Desa Batujala di bagi menjadi 11 (Sebelas) dusun, dimana di setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun dan di dampingi 1 (satu) RK (Rukun Keluarga). Oleh karena itu, pembagian wilayah Desa tersaji dalam tabel sebagai berikut;

4.2. Tabel Pembagian Wilayah Pemerintahan Desa

| No. | Jumlah Dusun | Jumlah RK |
|-----|------------------------|-----------|
| 1. | Dusun Batujala | 1 |
| 2. | Dusun Batujala Toa | 1 |
| 3. | Dusun Bungung Bangkala | 1 |
| 4. | Dusun Ballarompo I | 1 |
| 5. | Dusun Ballarompo II | 1 |
| 6. | Dusun Ta'buakang | 1 |
| 7. | Dusun Borongkeloro | 1 |
| 8. | Dusun Saluloe | 1 |
| 9. | Dusun Saluka | 1 |
| 10. | Dusun Parang Barata | 1 |
| 11. | Dusun Barata | 1 |

Sumber : Profil Desa Batujala

4. Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Desa Batujala

a. Kondisi Sosial

Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Batujala tidak berbeda dengan kondisi kehidupan sosial budaya di Desa lain yang ada di Jenepono dimana masyarakat masih menjunjung tinggi adat istiadat setempat seperti saling membantu terutama jika ada perkawinan, membangun rumah, sunnatan dll. Ditinjau dari aspek pendidikan yang ada di Desa Batujala sangatlah minim, minimnya tingkat pendidikan yang di tempuh disebabkan oleh faktor ekonomi yang terjadi, sehingga faktor pendorong untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak ada. Berdasarkan tabel sebagai berikut;

4.3. Tabel Keadaan tingkat pendidikan

| No. | Uraian | Jumlah | Satuan |
|-----|------------------------------|--------|--------|
| 1. | Lulusan D3-S1 keatas | 91 | Orang |
| 2. | Lulusan SMA | 177 | Orang |
| 3. | Lulusan SMP | 184 | Orang |
| 4. | Lulusan SD | 329 | Orang |
| 5. | Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah | 1.657 | Orang |

Sumber : profil desa batujala

b. Kondisi Ekonomi

Sumber mata pencaharian utama masyarakat Desa Batujala yang disesuaikan dengan hasil sensus penduduk adalah pertanian (85%), pedagang kecil (10%) dan sebagian kecil Pegawai Negeri Sipil (PNS) (2%)

dan lain-lain (3%). Namun demikian hasil dari pertanian masih dianggap kurang karena disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi seperti tanah kurang diolah karena kurangnya peralatan modern seperti Handtraktor, debit air kurang dan saluran irigasi kurang berfungsi dengan baik sehingga hasilnya kurang maksimal dan kurang mencukupi kebutuhan hidup meskipun lahan cukup luas oleh karena itu sebagian besar masyarakat utamanya kaum laki-laki dari keluarga miskin dan sangat miskin keluar Desa untuk mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan bahkan mereka memboyong anak/istrinya ikut kerja didaerah perkotaan demi untuk mempertahankan hidup keluarga mereka dan sebagian besar dari mereka rela bekerja sebagai buruh dan tukang becak.

Tabel 4.4 berdasarkan keadaan Ekonomi

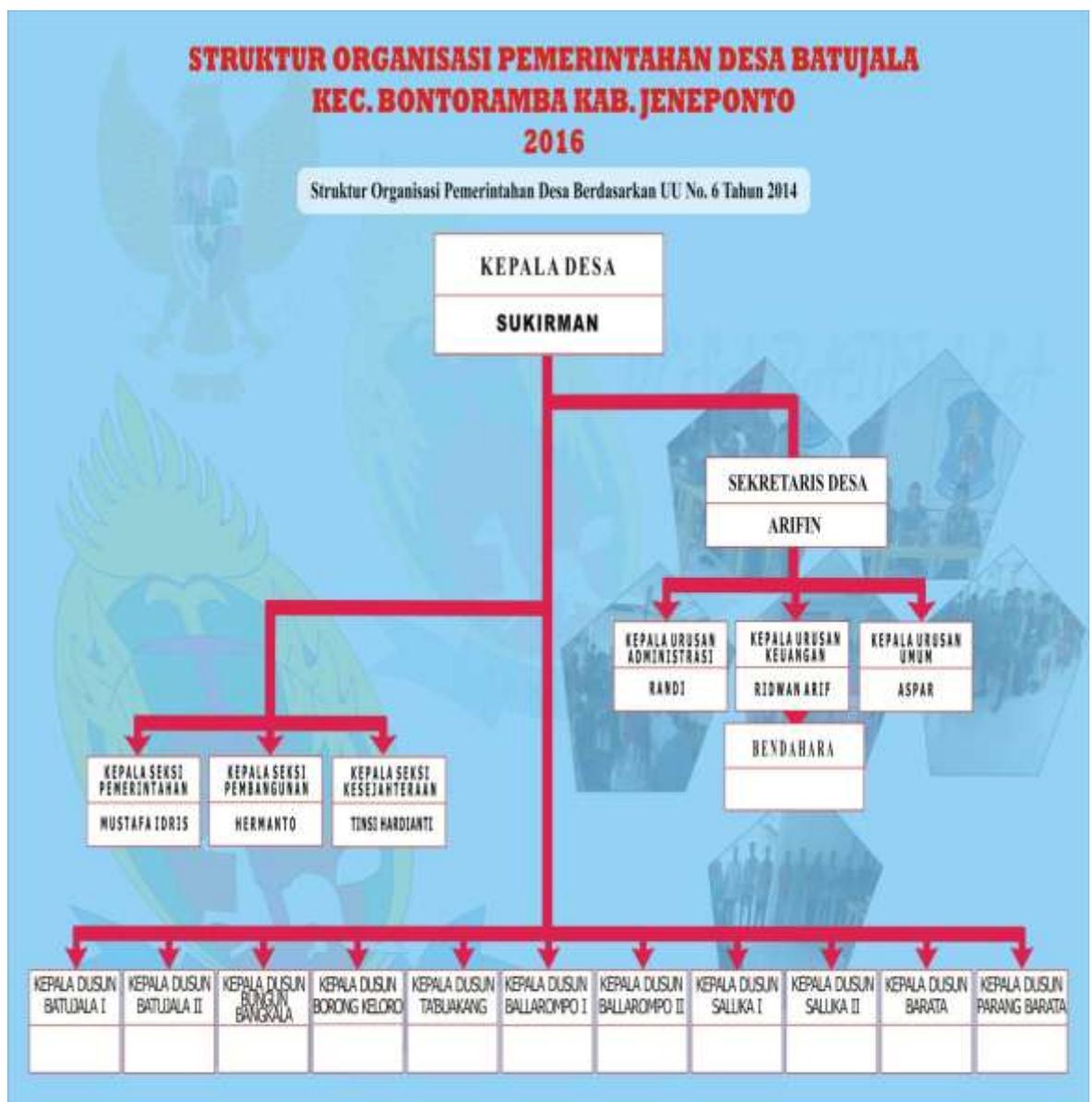
| No | Pekerjaan/Penghasilan Utama | Volume | Satuan |
|-----------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 22 | Orang |
| 2. | Polisi | 7 | Orang |
| 3. | Honoror | 32 | Orang |
| 5. | Sopir | 215 | Orang |
| 6. | Pensiunan | 21 | Orang |
| 7. | Petani | 1.028 | Orang |
| 8. | Pedagang | 43 | Orang |
| 9. | Perbengkelan | 12 | Orang |
| 10. | Peternak | 81 | Orang |
| 11. | Pertukangan Kayu | 35 | Orang |
| 12. | Tukang Batu | 127 | Orang |
| 14. | Wiraswasta | 203 | Orang |

Sumber : Profil Desa Batujala

a. Struktur Organisasi Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tata kelola sistem Pemerintahan Desa Batujala secara administrasi Pemerintahan, sebagai berikut

4.1. Gambar Struktur Perangkat Desa Batujala



B. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif frekuensi

Berikut ini akan digambarkan atau di deskripsikan dari data masing-masing informasi mengenai identitas diri responden mulai jenis kelamin, usia, dan pendidikan yang akan menampilkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian.

a. Deskriptif profil responden berdasarkan jenis kelamin

Deskriptif hasil responden berdasarkan jenis kelamin yaitu menguraikan atau menggambarkan jenis kelamin. Hal ini dapat di kelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu laki-laki dan perempuan adapun deskriptif hasil responden berdasarkan jenis kelamin di tabel berikut.

Tabel 4.1
Deskriptif hasil responden berdasarkan jenis kelamin

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | L | 18 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | P | 12 | 40.0 | 40.0 | 100.0 |
| | Total | 30 | 100.0 | 100.0 | |

Dari tabel 4.1 deskriptif profil responden berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 18 orang dengan presentase 60 % sedangkan perempuan sebanyak 12 orang dengan presentase 40 % sehingga dapat dijelaskan bahwa jumlah petani laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Dapat diketahui bahwa tidak semua laki-laki menjadi petani jagung kuning dan padi di Desa Batujala terdapat sebagian perempuan yang menjadi petani jagung kuning dan padi.

b. Deskriptif profil responden berdasarkan usia

Deskriptif hasil responden berdasarkan usia yaitu menguraikan atau menggambarkan usia. Hal ini dapat di kelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu laki-laki dan perempuan adapun deskriptif hasil responden berdasarkan usia di tabel berikut.

Tabel 4.2
Deskriptif hasil responden berdasarkan usia

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 2 | 4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| | 3 | 17 | 56.7 | 56.7 | 70.0 |
| | 4 | 9 | 30.0 | 30.0 | 100.0 |
| | Total | 30 | 100.0 | 100.0 | |

Dari tabel 4.2. mengenai deskripsi profil responden berdasarkan usia ternyata lebih banyak didominasi oleh responden yang berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 17 orang dengan presentase 56.70 %, usia responden 21-30 tahun sebanyak 4 orang dengan presentase 13.30 %, usia responden 41 keatas sebanyak 9 orang dengan presentase 30.0 % sehingga dapat di artikan bahwa dengan banyaknya dengan banyaknya responden yang berusia dewasa memungkinkan memiliki tenaga kerja yang baik dengan luas lahan yang rata-rata sehingga dapat meningkatkan produksi petani.

Tabel 4.3
Deskriptif hasil responden

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1 | 28 | 93.3 | 93.3 | 93.3 |
| | 3 | 2 | 6.7 | 6.7 | 100.0 |
| | Total | 30 | 100.0 | 100.0 | |

c. Deskriptif profil responden berdasarkan pendidikan

Dari tabel 4.3 deskripsi profil responden berdasarkan pendidikan yaitu masa pendidikan SMA sebanyak 28 orang dengan jumlah presentase 93.30 %, lulusan S1 sebanyak 2 orang, dengan jumlah presentase sebanyak 6.70 % sehingga dapat di artikan bahwa banyak responden yang yang memiliki pendidikan di tingkat SMA lebih banyak di bandingkan masa pendidikan ditingkat S1.

2. Analisis Deskriptif Regresi Linear

Berikut ini akan digambarkan atau di deskripsikan dari data masing-masing informasi mengenai nilai X yang dikenal sebagai penyaluran dana Desa dan nilai Y sebagai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .674 ^a | .454 | .434 | .47092 |

a. Predictors: (Constant), PENYALURAN

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai kolerasi/ hubungan R yaitu sebesar 0,674 dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang di sebut koefisien diterminasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,454 yang mengandung perngertian bahwa pengaruh variabel bebas (penyaluran) terhadap variabel terikat (kesejahteraan) adalah sebesar 45,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang belum sempat di telitili oleh peneliti.

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 5.157 | 1 | 5.157 | 23.255 | .000 ^a |
| | Residual | 6.210 | 28 | .222 | | |
| | Total | 11.367 | 29 | | | |

a. Predictors: (Constant), PENYALURAN

b. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN

pada bagian ini untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel penyaluran (X) terhadap variabel kesejahteraan (Y) dari output tersebut terlihat bahwa F hitung= 23,255 dengan tingkat signifikansi/probabilitas $0,000 < 0,05$ maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kesejahteraan.

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 1.867 | .403 | | 4.629 | .000 |
| | PENYALURAN | .543 | .113 | .674 | 4.822 | .000 |

a. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN

pada tabel coefficients, pada kolom B pada constant (a) adalah 1,867, sedangkan nilai Penyaluran (b) adalah 0,543 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a+bx \text{ atau } 1,867+0,543X$$

Koefisien arah regresi dan menyediakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel (X) sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila Bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negative. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan.

1. Konstanta sebesar 1,867 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai penyaluran maka nilai kesejahteraan sebesar 1,867
2. Koefisien regresi X sebesar 0,543 menyatakan bahwa setiap pertambahan 1 nilai penyaluran, maka nilai kesejahteraan bertambah sebesar 0,543

INTERPRESTASI HASIL UJI REGRESI SEDERHANA

Selain menggambarkan persamaan regresi output ini juga menampilkan uji signifikansi dengan uji t yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel penyaluram (X) sendiri (partial) terhadap variabel kesejahteraan (Y).

HIPOTESIS :

1. Ho: tidak ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel penyaluran (X) terhadap variabel kesejahteraan Y
2. Ha: ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel penyaluran (X) terhadap variabel kesejahteraan (Y)

Dari output diatas dapat di ketahui nilai t hitung = 4,822 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,005$, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel (X) penyaluran terhadap variabel (Y). kesejahteraan.

C. Hasil Pembahasan

1. Interpretasi hasil penelitian

Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel X yaitu penyaluran dana Desa dan 1 (satu) variabel Y kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pemerintah Desa Batujala **sukirman** penyaluran dana Desa adalah dana yang disalurkan kepada masyarakat untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Desa Batujala.

Menurut **zastrow** (2000) kesejahteraan adalah sebuah system yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan, dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa penyaluran dana Desa dapat di lakukan apabila masyarakat yang ada di dalamnya membutuhkan dana yang akan disalurkan oleh Pemerintah Desa Batujala dan Pemerintah mampu melihat kekurangan yang harus dibenahi dalam Desanya.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan diatas di peroleh hasil bahwa variabel (X) penyaluran berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) kesejahteraan.

Dari hasil analisis diatas melalui uji t diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel (X) penyaluran dan variabel (Y) kesejahteraan, hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t 4.822 yang berarti H_a diterima selain itu juga diperoleh persamaan regresi $Y=1,867+0,543X$. persamaan tersebut sesuai dengan rumus regresi linear sederhana yaitu $Y=a+Bx$, dimana Y merupakan lambing dari variabel terikat ,a konstanta, b koefisien regresi untuk variabel bebas (X) sehingga dapat disimpulkan dari hasil t, terdapat antara variabel Y terdapat variabel X, dengan kata lain menerima H_a yaitu: ada pengaruh penyaluran dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, dan menolak H_o , yaitu tidak ada pengaruh penyaluran dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

Konstanta sebesar 1.867 artinya jika penyaluran (X) nilainya adalah 0, maka kesejahteraan (Y) nilainya negatif yaitu sebesar 1.867, koefisien regresi variabel kesejahteraan sebesar 0,543: artinya jika penyaluran mengalami kenaikan 1, maka kesejahteraan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,543 koefisien bersifat positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel penyaluran (X) dan variabel kesejahteraan (Y), semakin naik penyaluran maka semakin meningkat kesejahteraan.

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penyaluran dana Desa cukup mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, di,amana dengan rutinitas melakukan penyaluran membuktikan masyarakat Desa Batujala tersebut mempunyai kesejahteraan yang cukup tinggi.

2. Menjawab masalah penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Pemerintah Desa Batujala, sekretaris Desa, dan masyarakat Desa Batujala. Sebetulnya Pemerintah dan sekretaris Desa Batujala mengatakan bahwa, penyaluran dana Desa yang di salurkan cukup efektif dan mampu meningkat kesejahteraan masyarakat Desa Batujala, tetapi pada saat itu, saya juga terjung langsung kedusun untuk melakukan wawancara dengan beralasan untuk memperkuat kata-kata yang di ucapkan oleh Pemerintah Desa dan sekretaris Desa.

Terdapat pengaruh yang signifikan antara penyaluran terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis kolerasi product moment sebesar 0,674 dibandingkan dengan r_{tabel} tingkat signifikansi 0,403 jadi r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka dapa di artikan bahwa hipotesis Nol (H_0) yaitu tidak ada pengaruh penyaluran dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Batujala Kecamatan bontotoramba Kabupaten Jeneponto di Tolak, dan hipotesis alternatif (H_a) yaitu ada pengaruh penyaluran dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto diterima dengan koefisien determinan sebesar 4,53 % berpengaruh positif, yang berarti jika semakin tinggi dana

yang di salurkan oleh Pemerintah Desa maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Dari hasil analisis uji t diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel (X) penyaluran dan variabel (Y) kesejahteraan. Hal ini dibuktikan dengan hasil dengan perhitungan uji t sebesar 4.822 yang berarti bahwa H_0 diterima yaitu ada pengaruh penyaluran terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Selain itu juga diperoleh persamaan regresi. $Y=1.867+ 0.543X$.

- a. Terbukti bahwa terdapat pengaruh penyaluran dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Maka untuk mengetahui seberapa besar .0,454 maka selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y menggunakan koefisien determinan r^2 yang dinyatakan dalam presentase hasilnya sebagai berikut.

$$R^2=0,454 \times 100 \%$$

$$=45,4 \%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 45,4 % dan selebihnya yang 45,6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang belum sempat diteliti oleh peneliti. adapun pengaruh yang diberikan oleh penyaluran dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan rutinitas melakukan penyaluran dapat meningkatkan pembangunan jalan tani, drainase, dan pemberian sarana pertanian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan Bab IV Sebelumnya dapat di tarik kesimpulan bahwa.

Dari hasil analisis diatas melalui uji T diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel (X) penyaluran dan variabel (Y) kesejahteraan, hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji T 4.822 yang berarti H_0 diterima selain itu juga diperoleh persamaan regresi $Y=1,867+0,543X$. persamaan tersebut sesuai dengan rumus regresi linear sederhana yaitu $Y=a+bx$, dimana Y merupakan lambang dari variabel terikat a konstanta b koefisien regresi untuk variabel bebas (X) sehingga dapat disimpulkan dari hasil T, terdapat antara variabel Y terdapat variabel X, dengan kata lain menerima H_0 yaitu: ada pengaruh penyaluran dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

Dari Hasil analisis Regresi linear telah mampu membuktikan bahwa, penyaluran dana Desa yang di salurkan oleh pemerintah Desa yang di bentuk melalui pembangunan jalan tani, drainase dan pemberian sarana pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang pertanian tepatnya di pendapatan jagung kuning, padi, dan juga mampu mempermudah pengangkutan jagung kuning dan padi untuk dibawah kerumah.

B. Saran

1. - Dengan adanya pengaturan anggaran Dana Desa, penyaluran dana Desa insyaAllah akan optimal sehingga mampu menunjukkan hasil yang maksimal seperti, rendahnya kemiskinan adanya peningkatan pendapatan asli Desa dan tingkat pendidikan yang tinggi, terbentuknya milik badan usaha milik Desa (BUMDES) dan juga optimalnya keswadayaan masyarakat, karena kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat Desa yang dinilai masih kurang sejahtera. Dengan peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan di Desa, diharapkan terjadi perbaikan tata kelola Pemerintah Desa. Pengawasan implementasi Desa akan berjalan dengan baik.
 - Kementerian Desa, PDT, dan transmigrasi melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang dana Desa yang menghambat upaya peningkatan pengelolaan anggaran dana Desa melalui peningkatan kembali partisipasi masyarakat. Kesiapan warga untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan kemampuan melakukan monitoring terhadap program-program yang dilakukakan di Desa. Meningkatkan sumber daya manusia dapat dilihat dari pendapatan dan pendidikan masyarakat Desa, sehingga ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat
2. - Saran bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya peneliti berpikir dulu sebelum mengambil judul skripsi yang berjudul Pengaruh Penyaluran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, karena penelitian hal-hal seperti ini tidak mudah untuk memasuki dan membuat kepala Desanya untuk jujur

secara universal melalui anggaran yang dia dapatkan dari Pemerintah yang di atasnya.

- saran bagi masyarakat, semoga dana yang di salurkan oleh pemerintah Desa yang dibentuk dengan pembangunan jalan tani, drainase, pemberian sarana pertanian mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan mampu bekerja sama dengan Pemerintah Desa untuk menjunjung tinggi kesejahteraan Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

DAFTAR PUSTAKA.

- Arie D. P.Mirah, 2017. *Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. Vol. 13, No. 2A.
- Achmad Djumali, 2014. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*
- Bambang Trisantono Soemantri. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandung: Fokus Media*.
- Drs. M. Arief Djamalud. *Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran*.
- Egon E. Bergel dalam Raharjo. 2006. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian*. Yogyakarta: UGM Pres.
- Fuad, Aris dan Kandungan sapto Nugroho (2014), *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif, Graha Ilmu Yogyakarta*.
- Hanif Nurcholis. (2002) *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Demak, Jawa Tengah*.
- Nurlan (2007), *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PT. Macanan Jaya Cemerlang*.
- Nugroho, 2013, *Dasar Permograman Web PHP-MySQL Dengan Dreamweaver, Yogyakarta : Gava Media*
- Manila, I GK, 2003 *Praktek Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Moh. Sofiyanto. 2004. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*. Vol. 1, No. 1.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Raharjo. 2006. *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. graha ilmu: Yogyakarta.
- Sahdan, Goris dkk (2004). *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Yogyakarta FPPD.
- Sukanto, 2012. *Efektifitas alokasi dana desa (ADD) dan kemiskinan di Propinsi Sumatera selatan*.

- Suharto, 2010. *Membangun Masyarakat Mmberdayakan Rakyat Bandung: Refika Aditama.*
- Suksesi. 2007. *Efektipitas Program Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Perekonomian Desa.*
- Sugiyono. (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Alfabeta.*
- Thomas. 2013, "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana.*
- Wardoyo, E. 2002. *Hutan Kemasyarakatan, Pengelolaan Hutan Partisipatif PUSKAP FISIP USU, WIM dan Yayasan Sintesa. Medan*
- Wasistiono, 2002. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah Sumedang: Alqopringt.*
- Widjaja , 2002 *Pemerintahan Desa, Jakarta, Rineke Cipta.*

| MENGETAHUI EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA DESA | |
|---|------------------------|
| 5 | SANGAT EFEKTIF |
| 4 | EFEKTIF |
| 3 | RELATIF SAMA |
| 2 | KURANG EFEKTIF |
| 1 | SANGAT KURANG EGFEKTIF |

| MENEGTAHUI PENGARUH PEMBANGUNAN JALAN TANI, DRAINASE DAN PEMEBERIAN SARANA PERTANIAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | |
|--|-------------------------|
| 5 | SANGAT MENINGKAT |
| 4 | MENINGKAT |
| 3 | RELATIF SAMA |
| 2 | TIDAK MENINGKAT |
| 1 | SANAGAT TIDAK MENINGKAT |

| NO | DAFTAR PERTANYAAN MENGENAI EFEKTIFITAS PENYALURA DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN TANI | ALTERNATIF JAWABAN | | | | |
|----|--|--------------------|---|----|----|-----|
| | | SE | E | RS | KR | SKE |
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 2 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 3 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 4 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 5 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 6 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 7 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 8 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 9 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 10 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 11 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 12 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 13 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 14 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 15 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 16 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 17 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 18 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 19 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 20 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 21 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 22 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 23 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 24 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 25 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 26 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 27 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 28 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 29 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |
| 30 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan jalan tani | | | | | |

| NO | DAFTAR PERTANYAAN MENGENAI EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DRAINASE | ALTERNATIF JAWABAN | | | | |
|----|---|--------------------|---|----|----|-----|
| | | SE | E | RS | KE | SKE |
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 2 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 3 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 4 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 5 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 6 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 7 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 8 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 9 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 10 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 11 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 12 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 13 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 14 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 15 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 16 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 17 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 18 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 19 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 20 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 21 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 22 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 23 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 24 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 25 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 26 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 27 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 28 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 29 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |
| 30 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pembangunan Drainase | | | | | |

| NO | DAFTAR PERTANYAAN MENGENAI EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA DESA TERHADAP PEMBERIAN SARANA PERTANIAN | ALTERNATIF JAWABAN | | | | |
|----|--|--------------------|---|----|----|-----|
| | | SE | E | RS | KE | SKE |
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 2 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 3 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 4 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 5 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 6 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 7 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 8 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 9 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 10 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 11 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 12 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 13 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 14 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 15 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 16 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 17 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 18 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 19 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 20 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 21 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 22 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 23 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 24 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 25 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 26 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 27 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 28 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 29 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |
| 30 | Apakah penyaluran dana Desa efektif dalam pemberian sarana pertanian | | | | | |

**Pembangunan Jalan Tani Yang Berpengaruh Terhadap
Pengangkutan Jagung Kuning, Dengan Sebesar Dana Yang di
Salurkan Sebanyak Rp 547.612.000**

| NO | RESPONDEN | JENIS KELAMIN | USIA | PENDIDIKAN | SEBELUM | SESUDAH |
|----|---------------|---------------|------|------------|-----------|------------|
| 1 | BASODDIN | L | 41 | SMA | 20 karung | 80 karung |
| 2 | SYAMSUDDIN | L | 33 | SMA | 30 karung | 120 karung |
| 3 | RASIDIN | L | 34 | SMA | 15 karung | 75 karung |
| 4 | DG PATI | P | 40 | SMA | 10 karung | 80 karung |
| 5 | SUDIRMAN | L | 40 | SMA | 25 karung | 85 karung |
| 6 | DARWIS | L | 40 | SMA | 25 karung | 80 karung |
| 7 | RAMLI | L | 35 | SMA | 20 karung | 100 karung |
| 8 | SAPARAN | L | 35 | SMA | 20 karung | 100 karung |
| 9 | HASMAWATI Spd | L | 33 | S1 | 40 karung | 150 karung |
| 10 | SAHARUDDIN | L | 33 | SMA | 20 karung | 100 karung |

**Pembangunan Drainase Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Padi, Dana
Yang Yang Di Salurkan Sebanyak Rp 19.733.000**

| NO | RESPONDEN | JENIS KELAMIN | USIA | PENDIDIKAN | SEBELUM | SESUDA H |
|----|----------------|---------------|------|------------|-----------|-------------|
| 1 | HAMSA | L | 35 | SMA | 10 karung | 30 karung |
| 2 | DG LIWANG | L | 40 | SMA | 10 karung | 30 karung |
| 3 | RANDI | L | 33 | SMA | 5 karung | 20 karung |
| 4 | KAMARUDDIN | L | 33 | SMA | 10 karung | 40 karung |
| 5 | SUHAPID | L | 37 | SMA | 10 karung | 20 karung |
| 6 | KAHARUDDIN Spd | L | 38 | S1 | 10 karung | 20 karung |
| 7 | DG MAKKA | L | 40 | SMA | 10 karung | 20 karung |
| 8 | DG NYINKI | L | 45 | SMA | 5 karung | 15 karung |
| 9 | DG MODDING | L | 45 | SMA | 15 karung | 20 karung |
| 10 | DG PATTA | L | 39 | SMA | 5 karung | 20 karung |

**PENGADAAN SARANA PERTANIAN, 2 HAND TRAKTOR, MENGHABISKAN DANA
SEBANYAK Rp 120.000.000**

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | USIA | PENDIDIKAN | SEBELUM | SESUDAH |
|-----------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | HARIATI | P | 38 | S1 | 10 KARUNG | 13 KARUNG |
| 2 | ANI | P | 35 | SMA | 15 KARUNG | 18 KARUNG |
| 3 | IDA | P | 35 | SMA | 20 KARUNG | 23 KARUNG |
| 4 | DAHALLIA | P | 40 | SMA | 15 KARUNG | 18 KARUNG |
| 5 | TINA | P | 38 | SMA | 15 KARUNG | 17 KARUNG |
| 6 | SUBA | P | 39 | SMA | 20 KARUNG | 24 KARUNG |
| 7 | SITTI | P | 45 | SMA | 20 KARUNG | 20 KARUNG |
| 8 | LIIJA | P | 43 | SMA | 20 KARUNG | 23 KARUNG |
| 9 | SUDA | P | 34 | SMA | 23 KARUNG | 25 KARUNG |
| 10 | KAHARUDDIN | L | 41 | SMA | 20 KARUNG | 22 KARUNG |

**MENGETAHUI HASIL RESPONDEN DARI MASYARAKAT MENGENAI
EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
JALAN TANI, DRAINASE DAN PEMEBERIAN SARANA PERTANIAN
MENCARI NILAI (X)**

| NO | RESPONDEN | PEMBANGUNAN JALAN TANI (X1) | PEMBANGUNAN DRAINASE (X2) | SARANA PERTANIAN (X3) | (X) |
|----|----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----|
| 1 | BASODDIN | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | SYAMSUDDIN | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | RASIDIN | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | DN PATI | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | SUDIRMAN | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | DARWIS | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | RAMLI | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | SAPARAN | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | HASMAWATI Spd | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | SAHARUDDIN | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | HAMSA | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 12 | DG LIWANG | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | RANDI | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 14 | KAMARUDDIN | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 15 | SUHAPID | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | KAHARUDDIN Spd | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 17 | DG MAKKA | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | DG NYINKI | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | DG MODDING | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 20 | DG PATTA | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 21 | HARIATI | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 22 | ANI | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 23 | IDA | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 24 | DAHALLIA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 25 | TINA | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 | SUBA | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | SITTI | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 28 | LIJA | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 29 | SUDA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | KAHARUDDIN | 5 | 4 | 3 | 4 |

**MENGETAHUI HASIL RESPONDEN DARI MASYARAKAT MENGENAI
PENGARUH PEMBANGUNAN JALAN TANI, DRAINASE DAN PEMEBERIAN
SARANA PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN JAGUNG KUNING DAN
PADI. Mencari Nilai (Y)**

| NO | RESPONDEN | PENDAPATAN JAGUNG (Y1) | PENDAPATAN PADI (Y2) | (Y) |
|----|----------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| 1 | BASODDIN | 4 | 3 | 3 |
| 2 | SYAMSUDDIN | 4 | 3 | 3 |
| 3 | RASIDIN | 4 | 4 | 4 |
| 4 | DN PATI | 4 | 4 | 4 |
| 5 | SUDIRMAN | 2 | 4 | 3 |
| 6 | DARWIS | 5 | 3 | 4 |
| 7 | RAMLI | 4 | 4 | 5 |
| 8 | SAPARAN | 4 | 4 | 4 |
| 9 | HASMAWATI Spd | 3 | 5 | 4 |
| 10 | SAHARUDDIN | 3 | 2 | 2 |
| 11 | HAMSA | 4 | 4 | 4 |
| 12 | DG LIWANG | 4 | 4 | 4 |
| 13 | RANDI | 4 | 5 | 4 |
| 14 | KAMARUDDIN | 5 | 4 | 4 |
| 15 | SUHAPID | 4 | 3 | 3 |
| 16 | KAHARUDDIN Spd | 3 | 4 | 3 |
| 17 | DG MAKKA | 5 | 5 | 5 |
| 18 | DG NYINKI | 5 | 4 | 4 |
| 19 | DG MODDING | 4 | 4 | 4 |
| 20 | DG PATTA | 3 | 4 | 3 |
| 21 | HARIATI | 3 | 5 | 4 |
| 22 | ANI | 4 | 4 | 4 |
| 23 | IDA | 4 | 4 | 4 |
| 24 | DAHALLIA | 4 | 5 | 4 |
| 25 | TINA | 5 | 3 | 4 |
| 26 | SUBA | 4 | 4 | 4 |
| 27 | SITTI | 4 | 5 | 4 |
| 28 | LIJA | 5 | 4 | 3 |
| 29 | SUDA | 4 | 4 | 4 |
| 30 | KAHARUDDIN | 3 | 5 | 4 |

Penyaluran Dana Desa Yang Dibentuk Melalui Pembangunan Jalan Tani



Penyaluan Dana Desa Yang Dibentuk Melalui Pembangunan Drainase



Melakukan Wawancara Kepada Pemerintah Desa Batujala, Sekretaris Desa Batujala, Dan Setiap Dusun Di Desa Batujala





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 4919/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Jeneponto

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 367/Izn-5C.4-VIII/IV/37/2018 tanggal 21 April 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RISWAN**
Nomor Pokok : 10571 02066 14
Program Studi : IESP
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGARUH PENYALURAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BATULAJA KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO "

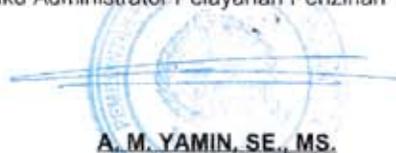
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 April s/d 24 Juni 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 23 April 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 24-04-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2t.bkpm.d.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





BIOGRAFI PENULIS

Riswan yang biasa di panggil Ciwang tinggal di Kabupaten Jeneponto kecamatan bontoramba Desa Batujala Dusun Ballarompo tempat tanggal lahir Ballarompo 29 Mei 1997 dari pasangan suami istri Bapak Rasidin dan Ibu Suri. Peneliti adalah anak pertama dari kedua bersodarah. Peneliti yang sekarang Bertempat tinggal di KOMPLEKS BTN BERLIAN INDAH.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 147 Bulobulo toa lulus pada tahun 2008, SMP Negeri 2 Bontoramba lulus pada tahun 2011, SMA Negeri 1 Bontoramba lulus pada tahun 2014, dan dimulai pada tahun 2014 mengikuti Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Sampai Dengan Sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.